

DAMPAK EKONOMI DIGITAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS INDONESIA

NURUL HUDA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
nurul.huda.macintosh@gmail.com

Abstrak

Di tengah pesatnya gelombang transformasi digital, Indonesia telah menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Namun, di balik gemerlap kemajuan teknologi, tersembunyi sebuah paradoks: apakah ekonomi digital benar-benar mendorong pemerataan, atau justru memperdalam jurang ketimpangan pendapatan? Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan kritis tersebut dengan menganalisis dampak ekonomi digital mulai dari e-commerce, fintech, hingga penetrasi internet terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Dengan mengolah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, dan laporan industri terkini, penelitian ini mengungkap temuan menarik: ekonomi digital ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu peluang baru bagi UMKM dan masyarakat pedesaan melalui akses pasar yang lebih luas dan inklusi keuangan. Namun, di sisi lain, ia juga memperlebar kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi yang mampu memanfaatkan teknologi dan kelompok berpendapatan rendah yang tertinggal akibat keterbatasan akses dan keterampilan.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga menawarkan solusi. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pembangunan infrastruktur digital yang merata, peningkatan literasi digital, dan regulasi yang inklusif untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya ekonomi digital yang tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Digital, Inklusi Keuangan, Transformasi Digital.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk di negara berkembang. Di Indonesia, pertumbuhan platform e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya telah menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, ada kekhawatiran bahwa manfaat ekonomi digital tidak terdistribusi secara merata, sehingga berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan.

Perkembangan ekonomi digital telah menjadi salah satu fenomena paling transformatif abad ke-21, mengubah cara bisnis dilakukan, bagaimana masyarakat berinteraksi, dan bagaimana negara mengelola pertumbuhannya. Ekonomi digital, yang mencakup aktivitas ekonomi berbasis teknologi seperti e-commerce, fintech, layanan digital, dan platform online, telah menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi global. Di negara berkembang seperti Indonesia, ekonomi digital dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru yang dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 476 triliun, menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara¹

Namun, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, muncul kekhawatiran bahwa ekonomi digital dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui koefisien Gini, telah menjadi isu penting di Indonesia. Pada tahun 2022, koefisien Gini Indonesia berada pada angka 0,384, menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi.² Meskipun ekonomi digital menciptakan peluang baru, seperti lapangan kerja di sektor teknologi dan peningkatan produktivitas UMKM, tidak semua kelompok masyarakat dapat mengakses manfaat tersebut secara merata.

Kelompok berpendapatan tinggi dan terdidik cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital, sementara kelompok berpendapatan rendah dan kurang terampil seringkali tertinggal. Misalnya, pekerja dengan keterampilan digital tinggi, seperti programmer atau data scientist, menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan, sementara pekerja di sektor tradisional, seperti pertanian atau manufaktur, menghadapi stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan. Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi faktor yang memperparah ketimpangan. Misalnya, akses internet di Jawa mencapai 75%, sedangkan di Papua hanya 35%.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah ekonomi digital benar-benar inklusif, atau justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi yang sudah ada?

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Ekonomi Digital Indonesia 2022.

² BPS. (2023). *Statistik Ketimpangan Pendapatan Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.

³ Kominfo. (2022). Laporan Survei Internet APJII 2022. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk mengungkap hubungan antara perkembangan ekonomi digital dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari berbagai lembaga terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, dan OECD, serta laporan industri terkini seperti survei dari Google, Temasek, dan Bain. Data sekunder ini dipilih karena kredibilitas dan cakupannya yang luas, memungkinkan analisis mendalam tentang dinamika ekonomi digital dan dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan.⁴

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua metode utama. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk memetakan tren perkembangan ekonomi digital, seperti pertumbuhan e-commerce, adopsi fintech, dan penetrasi internet, serta menggambarkan pola ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kedua, analisis regresi linier diterapkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi digital memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Dengan menggabungkan data berkualitas tinggi dan metode analisis yang robust, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berharga dalam memahami dampak ekonomi digital terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia

1. Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia

Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 476 triliun, menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di kawasan ini.⁵ Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya penetrasi internet, adopsi smartphone, dan dukungan pemerintah melalui berbagai inisiatif seperti "Making Indonesia 4.0" dan "Digital Roadmap 2021-2024".

Sektor e-commerce menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah mengubah cara masyarakat

⁴ BPS. (2023). Statistik Ketimpangan Pendapatan Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.

⁵ BPS. (2023). Statistik Ketimpangan Pendapatan Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.

berbelanja, dengan lebih dari 60% populasi Indonesia kini aktif berbelanja online.⁶ Selain e-commerce, sektor fintech juga mengalami pertumbuhan pesat. Layanan seperti GoPay, OVO, dan DANA telah memudahkan transaksi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Pada tahun 2022, nilai transaksi fintech di Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun, menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mendorong inklusi keuangan.⁷

2. Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital

Beberapa faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia antara lain:

a. Meningkatnya Penetrasi Internet

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 210 juta orang pada tahun 2023, atau sekitar 77% dari total populasi.⁸ Peningkatan penetrasi internet ini didorong oleh ketersediaan jaringan 4G yang luas dan harga smartphone yang semakin terjangkau.

b. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong transformasi digital, seperti insentif pajak bagi startup teknologi, pembangunan infrastruktur digital, dan program pelatihan keterampilan digital. Inisiatif seperti "1000 Startup Digital" juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem startup yang kuat di Indonesia.

c. Pertumbuhan UMKM Digital

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam ekonomi digital Indonesia. Platform seperti Tokopedia dan Shopee telah memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online, meningkatkan akses pasar dan pendapatan. Pada tahun 2022, lebih dari 15 juta UMKM telah terdaftar di platform e-commerce.⁹

d. Investasi Asing

Indonesia menarik minat investor asing dalam sektor teknologi dan digital. Perusahaan global seperti Alibaba, Tencent, dan SoftBank telah menginvestasikan

⁶ Google, Temasek, & Bain. (2022). e-Conomy SEA 2022 Report.

⁷ OJK. (2023). Laporan Perkembangan Fintech Indonesia 2023. Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ APJII. (2023). Survei Penetrasi Internet di Indonesia 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

⁹ Kemenkop UKM. (2023). Laporan Perkembangan UMKM Digital 2023. Kementerian Koperasi dan UKM.

miliaran dolar dalam startup lokal seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

3. Dampak Ekonomi Digital terhadap Masyarakat

Ekonomi digital telah membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia, baik positif maupun negatif.

a. Dampak Positif

- 1) Penciptaan Lapangan Kerja: Sektor digital telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, platform ride-hailing seperti Gojek dan Grab telah mempekerjakan lebih dari 2 juta pengemudi ojek online.¹⁰
- 2) Inklusi Keuangan: Layanan fintech telah memudahkan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, untuk mengakses layanan keuangan. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan keuangan antara perkotaan dan pedesaan.
- 3) Peningkatan Produktivitas UMKM: Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Misalnya, UMKM yang bergabung dengan platform e-commerce melaporkan peningkatan penjualan hingga 30%.¹¹

b. Dampak Negatif

- 1) Ketimpangan Digital: Meskipun ekonomi digital menawarkan peluang besar, tidak semua masyarakat dapat mengakses manfaatnya secara merata. Kesenjangan infrastruktur digital antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan serius. Misalnya, akses internet di Jawa mencapai 75%, sedangkan di Papua hanya 35%.¹²
- 2) Disrupsi Pekerjaan Tradisional: Pertumbuhan ekonomi digital juga mengancam pekerjaan di sektor tradisional, seperti retail konvensional dan transportasi tradisional. Banyak pekerja di sektor ini menghadapi penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan.

¹⁰ Gojek. (2023). Laporan Dampak Sosial Gojek 2023.

¹¹ Kemenkop UKM. (2023). Laporan Perkembangan UMKM Digital 2023. Kementerian Koperasi dan UKM.

¹² Kominfo. (2022). Laporan Survei Internet APJII 2022. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

- 3) Isu Perlindungan Data: Dengan meningkatnya aktivitas digital, isu perlindungan data dan privasi menjadi semakin penting. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko keamanan data, sementara regulasi perlindungan data di Indonesia masih dalam tahap perkembangan.

4. Tantangan dan Peluang ke Depan

Meskipun ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar, beberapa tantangan perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

a. Tantangan

- 1) Infrastruktur Digital: Pembangunan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan internet dan listrik untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Keterampilan Digital: Literasi dan keterampilan digital masih rendah di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Program pelatihan dan pendidikan digital perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi digital.
- 3) Regulasi: Regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi isu seperti perlindungan data, persaingan usaha, dan perpajakan perusahaan teknologi.

b. Peluang

- 1) Pertumbuhan Startup: Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat startup digital di Asia Tenggara. Dukungan pemerintah dan investasi asing dapat mempercepat pertumbuhan startup lokal.
- 2) Ekonomi Hijau Digital: Ekonomi digital dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mendorong inovasi dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan manajemen limbah.
- 3) Kolaborasi Internasional: Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama internasional untuk memperkuat ekonomi digital, seperti melalui pertukaran teknologi dan pengetahuan dengan negara-negara maju.

Dampak Ekonomi Digital terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

1. Dampak Positif Ekonomi Digital terhadap Ketimpangan Pendapatan

Ekonomi digital memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses terhadap peluang ekonomi dan inklusi keuangan. Di Indonesia, platform digital seperti e-commerce dan fintech telah membuka pintu bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti UMKM dan masyarakat pedesaan, untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern.

a. Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM

Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online, meningkatkan akses pasar dan pendapatan. Misalnya, UMKM yang bergabung dengan platform e-commerce melaporkan peningkatan penjualan hingga 30%.

¹³Dengan mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional, UMKM dapat menikmati margin keuntungan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antara pelaku usaha kecil dan besar.

b. Inklusi Keuangan melalui Fintech

Layanan fintech seperti GoPay, OVO, dan DANA telah memudahkan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, untuk mengakses layanan keuangan. Menurut OJK, lebih dari 60% pengguna fintech di Indonesia berasal dari daerah non-perkotaan. Inklusi keuangan ini memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses pinjaman, melakukan transaksi, dan menabung, yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka.¹⁴

c. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Ekonomi digital telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, platform ride-hailing seperti Gojek dan Grab telah mempekerjakan lebih dari 2 juta pengemudi ojek online.¹⁵ Lapangan kerja ini seringkali terbuka bagi kelompok berpendapatan rendah yang tidak memiliki keterampilan formal, sehingga memberikan mereka sumber pendapatan yang stabil.

¹³ Kemenkop UKM. (2023). Laporan Perkembangan UMKM Digital 2023. Kementerian Koperasi dan UKM.

¹⁴ OJK. (2023). Laporan Perkembangan Fintech Indonesia 2023. Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁵ Gojek. (2023). Laporan Dampak Sosial Gojek 2023.

2. Dampak Negatif Ekonomi Digital terhadap Ketimpangan Pendapatan

Meskipun ekonomi digital menawarkan peluang besar, ia juga dapat memperburuk ketimpangan pendapatan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Kesenjangan Digital antara Perkotaan dan Pedesaan

Akses terhadap infrastruktur digital masih sangat timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut Kominfo, akses internet di Jawa mencapai 75%, sedangkan di Papua hanya 35%. Kesenjangan ini membuat masyarakat pedesaan sulit memanfaatkan peluang ekonomi digital, sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan antara kota dan desa.¹⁶

b. Disrupsi Pekerjaan Tradisional

Pertumbuhan ekonomi digital mengancam pekerjaan di sektor tradisional, seperti retail konvensional dan transportasi tradisional. Banyak pekerja di sektor ini menghadapi penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bersaing dengan platform digital. Misalnya, pedagang kecil di pasar tradisional seringkali kalah bersaing dengan e-commerce yang menawarkan harga lebih murah dan kemudahan transaksi.

c. Kesenjangan Keterampilan Digital

Kelompok berpendapatan tinggi dan terdidik cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital, sementara kelompok berpendapatan rendah dan kurang terampil seringkali tertinggal. Misalnya, pekerja dengan keterampilan digital tinggi, seperti programmer atau data scientist, menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan, sementara pekerja di sektor tradisional menghadapi stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan.

3. Faktor yang Memperparah Ketimpangan Pendapatan

Beberapa faktor yang memperparah dampak negatif ekonomi digital terhadap ketimpangan pendapatan antara lain:

a. Ketidaksetaraan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan digital membuat banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak mampu

¹⁶ Kominfo. (2022). Laporan Survei Internet APJII 2022. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

memanfaatkan peluang ekonomi digital. Program pelatihan yang ada seringkali tidak menjangkau kelompok berpendapatan rendah, sehingga memperlebar kesenjangan keterampilan.

b. Regulasi yang Tidak Merata

Regulasi yang tidak merata atau tidak jelas dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Misalnya, perusahaan teknologi besar seringkali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan jaringan, sementara UMKM dan pelaku usaha kecil kesulitan bersaing. Selain itu, kurangnya regulasi perlindungan data dapat merugikan konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah yang kurang memahami risiko keamanan digital.

c. Ketergantungan pada Modal Asing

Banyak startup digital di Indonesia bergantung pada investasi asing, yang dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi keuntungan. Misalnya, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi seringkali mengalir ke investor asing, sementara masyarakat lokal hanya menikmati sebagian kecil dari manfaat ekonomi tersebut.

4. Upaya untuk Mengurangi Dampak Negatif

Untuk memastikan bahwa ekonomi digital dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

a. Pembangunan Infrastruktur Digital yang Merata

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa semua masyarakat dapat mengakses internet dan layanan digital.

b. Peningkatan Literasi dan Keterampilan Digital

Program pelatihan dan pendidikan digital perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital.

c. Regulasi yang Inklusif

Regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi isu seperti perlindungan data, persaingan usaha, dan perpajakan perusahaan teknologi. Regulasi ini harus dirancang untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen, sambil mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

d. Dukungan bagi UMKM

Pemerintah dan sektor swasta perlu memberikan dukungan lebih besar bagi UMKM, seperti akses terhadap modal, pelatihan, dan teknologi, untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing dalam ekonomi digital.

D. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berbelanja, bertransaksi, hingga bekerja. Namun, untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dinikmati secara merata, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan infrastruktur, keterampilan, dan regulasi, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi digital memiliki dampak ganda terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Di satu sisi, ia menciptakan peluang baru bagi UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Di sisi lain, ia juga dapat memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dinikmati secara merata, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan akses, keterampilan, dan regulasi. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi digital dapat menjadi alat yang powerful untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

APJII. (2023). *Survei Penetrasi Internet di Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ekonomi Digital Indonesia 2022*.

BPS. (2023). *Statistik Ketimpangan Pendapatan Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.

Gojek. (2023). *Laporan Dampak Sosial Gojek 2023*.

Google, Temasek, & Bain. (2022). *e-Conomy SEA 2022 Report*.

Kemenkop UKM. (2023). *Laporan Perkembangan UMKM Digital 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM.

Kominfo. (2022). *Laporan Survei Internet APJII 2022*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

_____. (2023). *Laporan Survei Internet APJII 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

OJK. (2023). *Laporan Perkembangan Fintech Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

